

:: GANTI RUGI PROYEK JORR W2

Lobi Harga Lahan, Jokowi Temui Warga

JAKARTA—Nilai ganti rugi 140 bidang tanah di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk proyek Jakarta Outer Ring Road West II (JORR W II) mulai ada titik terang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal harga lahan sekitar Rp2 juta per meter.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Jokowi turun langsung menemui warga kemarin. "Kita *ngomong* sekali lagi sudah rampung, insya Allah. Sudah kelihatan kok, sudah kelihatan titiknya," ujar Jokowi kemarin.

Jokowi berharap warga tidak terprovokasi pihak ketiga

sehingga bisa segera tuntas. Pihaknya sudah membuat perkiraan harga rasional. "Lebih dari Rp2 juta (per meter)," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pada dasarnya warga Petukangan Selatan setuju dengan pembangunan JORR W2. Selama pertemuan, Jokowi mengimbau warga untuk bisa berbicara dari hati ke hati. Menurutnya, masalah ini tidak perlu diselesaikan dengan unjuk rasa. Karena dengan perbincangan santai, masalah tersebut bisa segera diselesaikan. "Tidak usah teriak-teriak dan berdemo, kalau mau menyampaikan sesuatu cukup dengan pertemuan seperti ini,"

ujarnya.

Proyek pembebasan lahan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2010. Saat ini masih ada 2 hektare tanah yang belum dibebaskan, terdiri dari 89 bidang tanah. Dalam satu bidang tanah terdiri dari sembilan atau delapan kepala keluarga. Sedangkan warga yang terkena pembebasan lahan sekitar 1.150 orang. Pada surat keputusan yang diturunkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, tanah itu dihargai sebesar Rp920.000 per meter. Sedangkan pada SK Gubernur No 1907/2010 tanggal 4 November 2010, besaran ganti rugi tanah bangunan dan tanaman proyek Jalan Tol

JORR W2 Rp2 juta per meter.

Ketua Tim Pengadaan Tanah JORR W2 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ambari Effendi mengatakan, ada sekitar 140 bidang tanah yang masih belum tuntas. Persidangan di Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan untuk melakukan musyawarah ulang. Para pemilik lahan yang memerkarakan kasus tersebut merasa tidak diajak melakukan musyawarah penentuan harga. "Waktu itu mereka hanya mengutus perwakilan, ya kalau kita sudah ketemu perwakilan berarti harusnya sah. Sekarang jadi diulang tahap musyawarah," kata Ambari.

● **helmi syarif**